

**TESIS**

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOTA PALOPO**

*The Effect Of Regional Financial Management And Regional  
Financial Accounting System With Information Technology As  
A Moderation Variable On The Quality Of Financial Reports In  
The City Of Palopo*

Disusun dan diajukan oleh :

**NURFATIMA AZZAHRA BASO**

**A042212001**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**



**TESIS**

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN  
TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOTA PALOPO**

*The Effect Of Regional Financial Management And Regional  
Financial Accounting System With Information Technology As  
A Moderation Variable On The Quality Of Financial Reports In  
The City Of Palopo*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

Disusun dan diajukan oleh :

**NURFATIMA AZZAHRA BASO**

**A042212001**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**



# TESIS

## PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOTA PALOPO

disusun dan diajukan oleh

**NURFATIMA AZZAHRA BASO**

**A042212001**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
tanggal **04 Agustus 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota

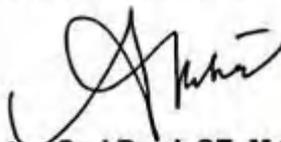


**Dr. Fauziah Umar, SE.,MS**  
NIP. 196107131987022001



**Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si**  
NIP. 197106192000031001

Ketua Program Studi Magister Keuangan  
Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Idia Ratna Sari Dewi, SE.,M.Si**  
96704141994121001



Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

**Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si**  
NIP. 197209212006042001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **NURFATIMA AZZAHRA BASO**

NIM : **A042212001**

Jurusan/program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul:

### **PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KOTA PALOPO**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003,

); ayat 2 dan Pasal 70).



Makassar, 2023

Yang Menyatakan,



Nurfatima Azzahra Baso



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## PRAKATA

Maha Suci Allah yang menggenggam takdir setiap mahluknya, dengan takdir baik NYA peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo.**

Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan setiap penduduk bumi untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Penyelesaian tesis ini tidaklah mudah bagi peneliti, hambatan dan cobaan tetap ada untuk menjadi energi positif dalam menyelesaikan tugas akhir ini, hambatannya kemudian menjadi suluh untuk membentuk karakter yang jauh lebih baik bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa karya ini tidak akan rampung tanpa dukungan dari pihak lain oleh karena itu melalui kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa.,M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;



. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti

kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;

3. Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si.,CRA.,CRP.,CWM selaku Wakil Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Andi Ratna Sari Dewi. SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
5. Ibu Dr. Fauziah Umar, SE.,MS dan Bapak Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si.,CRA.,CRP.,CWM sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;
6. Bapak Dr. Hamrullah, SE.,M.Si, Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE.,M.Si selaku dosen penguji, terima kasih atas masukan dan nasehat yang telah diberikan untuk penyusunan penelitian ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;



ak dan Ibu Pegawai lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
ersitas Hasanuddin Pak Haris dan pegawai lainnya yang tidak

penelitisebutkan.;

9. Orang tua peneliti, Ayahanda Hj. Baso Tola dan Ibu Hj. Idawati, terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa yang diberikan selama proses penyusunan penelitian ini.
10. Saudara Tercinta Kakak Laki-Laki saya Muhammad Alfath Baso S.M beserta Istri tercinta Nurul Aminy Zahra S.M anak Terkasih Hafidzah Humaerah Alfath dan Adik Perempuan saya Nabila Azizah Baso
11. Segenap Rekan Perkuliahan Program Studi Megister Keuangan Daerah Angkatan 2021/1.
12. Semua pihak yang turut terlibat dalam penelitian ini yang tidak sempat disebutkan namanya, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, walau penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penelitian ini.

Makassar, 2023

NURFATIMA AZZAHRA BASO



## ABSTRAK

NURFATIMA AZZAHRA BASO. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah* (dibimbing oleh Fauziah Umar dan Mursalim Nohong).

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses pengelolaan keuangan dan penggunaan sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian dengan metode penelitian asosiatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Adapun sampel sebanyak 50 responden (Kepala Badan, Sekertaris Badan, Sub-Bagian dan Sub-Bidang). Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan *analisis moderated regression analysis* dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi hubungan pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci: manajemen keuangan, sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan.



## ABSTRACT

**NURFATIMA AZZAHRA BASO.** *The Influence of Regional Financial Management and Regional Financial Accounting System with Information Technology as a Moderating Variable on of Regional Financial Report Quality* (supervised by Fauziah Umar and Mursalim Nohong)

The research aims to describe and analyse the influence of the processes of the financial management and the use of the financial accounting system on the financial report quality using information technology. The research used the associative method and quantitative approach. The research samples were 50 respondents (Head of Agency, Secretary of Agency, and Subdivisions). The research data were obtained by distributing the questionnaires. This research was examined using the multiple linear regression analysis and moderated regression analysis with the SPSS application. The research results indicate that the regional financial management and regional financial accounting system affect the regional financial report quality. Furthermore, the research shows that the information technology can moderate the relationship between the regional financial management and the regional financial accounting system on the regional financial report quality.

**Key words:** financial management, financial accounting system, information technology utilization and financial statement quality



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Tinjauan Teoritis .....	15
2.1.1. Teori keagenan ( <i>agency theory</i> ).....	15
2.1.2 Teori Kegunaan Informasi ( <i>Decision-Usefulness Theory</i> ).....	18
3. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	20



2.1.4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah .....	24
2.1.5. Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	26
2.1.6. Teknologi Informasi .....	30
2.2. Hubungan Antara Variabel .....	34
2.3. Tinjauan Empiris .....	37

### **BAB III. KARANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

3.1. Karangka Pemikiran.....	43
3.2. Hipotesis.....	44

### **BAB IV. METODE PENELITIAN**

4.1. Rancangan Penelitian.....	45
4.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	45
4.3. Populasi dan Sampel .....	46
4.4. Jenis dan Sumber Data .....	49
4.5. Teknik Pengumpulan Data.....	50
4.6. Definisi Operasioal.....	50
4.7. Analisis Statistik Deskriptif .....	53
4.8. Uji Instrumen Penelitian .....	54
4.9. Uji Asumsi Klasik .....	55
4.10. Uji Hipotesis.....	58

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

5.1. Gambaran Umum Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palopo .....	61
Il Penelitian .....	67
bahasan Hasil Analisis Data .....	89



## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan.....	99
6.2. Implikasi.....	100
6.3 Keterbatasan .....	100
6.4. Saran.....	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Definisi Operasional .....	51
Tabel 5.1 Karakteristik Responden .....	67
Tabel 5.2 Hasil Uji Deskriptif .....	69
Tabel 5.3 Deskriptif Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) .....	71
Tabel 5.4 Deskriptif Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) ...	73
Tabel 5.5 Deskriptif Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) .....	74
Tabel 5.6 Deskriptif Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z).....	75
Tabel 5.7 Hasil Uji Validitas .....	78
Tabel 5.8 Hasil Uji Reliabilitas .....	80
Tabel 5.9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	82
Tabel 5.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....	84
Tabel 5.11 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ ).....	85
Tabel 5.12 Hasil Uji Analisis Moderat Regression Analysis (MRA) .....	85
Tabel 5.13 Hasil Uji Determiniasi ( $R^2$ ) Setelah MRA .....	86



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Karangka Pemikiran.....	43
Gambar 5.1 Struktur Organisasi BPKAD Palopo .....	66
Gambar 5.2 Grafik Uji Normalitas .....	81
Gambar 5.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	83



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kusioner

Lampiran 2. Hasil Uji Deskriptif Variabel

Lampiran 3. Hasil Uji Validitas

Lampiran 4. Hasil Uji Realibilitas

Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas

Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Lampiran 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Lampiran 9. Hasil Uji Analisis Moderated Regression Analysis (MRA)

Lampiran 10. Uji t

Lampiran 11. Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )

Lampiran 12. Surat Izin Penelitian Pemerintah Provinsi SulSel Dinas

PTSP

Lampiran 13. Surat Izin Penelitian Pemerintah Kota Palopo Dinas

PTSP

Lampiran 14. Surat Izin Penelitian Pemerintah Kota Palopo BPKAD



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh stakeholder (Defitri, 2018), untuk itu aparat pemerintah harus dapat mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Sukmaningrum, 2012). Selain itu, pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Kota Palopo sebagai entitas pelaporan yang dituntut untuk menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah, tentunya dituntut untuk menyajikan data dan informasi keuangan yang berkualitas. laporan keuangan pemerintah Kota Palopo mempunyai peranan penting sebagai dasar informasi yang handal pengambilan keputusan dalam pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Penyediaan informasi akuntansi oleh pemerintah daerah juga diperlukan salah satunya untuk akses investasi, keberlanjutan pembiayaan pembangunan dan pelayanan public.



nya penyusunan laporan keuangan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimiliki,

pengendalian aset, kewajiban dan modal serta perencanaan pendapatan dan efisiensi biaya-biaya yang terjadi yang pada akhirnya sebagai alat untuk pengambilan keputusan pemerintah Kota Palopo. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palopo harus menjadi perhatian untuk menjadi dokumen strategis dalam merumuskan dan menganalisis strategi perencanaan keuangan dimasa yang akan datang, tidak sekedar dalam memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palopo dapat dilihat dari suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan dan indikator-indikator pengelolaan keuangan lintas sectoral, meskipun Kota Palopo telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama mulai tahun 2015 sampai dengan 2022 Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan pemerintah daerah antara lain Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Teknologi Informasi Tujuannya adalah untuk menganalisis besarnya pengaruh masing masing terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



oran keuangan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari sisi opini, tapi sejauh mana laporan keuangan memberikan dampak informasi

yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk perencanaan anggaran dimasa mendatang, akan tetapi kasus Di Kota Palopo laporan keuangan dijadikan tidak sepenuhnya dijadikan dasar pengambilan keputusan secara ekonomis, disisi lain laporan keuangan pemerintah daerah masih memiliki temuan-temuan pemeriksaan baik temuan administratif maupun sifatnya pengembalian kerugian negara/daerah, dengan demikian temuan pemeriksaan tersebut berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Palopo sebagai pengelola pembangunan dan keuangan serta pelayanan publik, memiliki kewajiban untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan aktifitas pemerintahan yang dituangkan dalam dokumen laporan keuangan atas pengelolaan dana pemerintah Kota Palopo.

Salah satu syarat kualitas laporan keuangan adalah andal, dan laporan keuangan dikatakan andal jika terbebas dari hal yang menyesatkan, kesalahan yang material, menyajikan dengan jujur, dan dapat diverifikasi. Laporan keuangan agar dapat diandalkan, maka harus disajikan dengan lengkap, tanpa ada informasi bias. Pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Palopo menarik untuk dikaji lebih lanjut sebab kenyataannya di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari tahun 2017-2019 sebanyak 652 temuan belum ditindaklanjuti oleh



tah Kota Palopo. Kepala Inspektorat Kota Palopo Asir Mangopo konfirmasi (26/1/2022) mengakui adanya temuan tersebut.

Sementara itu, temuan hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK tercatat diantaranya terkait rekanan belum membayar, pemegang kas perusahaan daerah belum menyetor, bendahara belum menagih pajak, pengembalian oleh rekanan tidak lancar, rekanan belum mengembalikan, PNS belum mengembalikan, perjalanan PNS diduga fiktif, pertanggungjawaban makan minimum tidak sesuai dengan sebagainya dengan demikian maka peneliti perlu melihat lebih jauh kondisi tersebut diatas pada sisi ketersediaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan teknologi informasi sebagai sarana yang mampu melahirkan kualitas laporan keuangan dimasa yang akan datang. Dengan adanya hal tersebut peneliti menganggap bahwa laporan keuangan kota palopo tidak sesuai dengan yang telah dilaporkan. Kualitas laporan keuangan tidak memenuhi indikator relevan dikarenakan adanya temuan-temuan yang tidak di catatkan sebagaimana seharusnya.

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan berkualitas apabila informasi akuntansi tersebut memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan maka, harus



g oleh kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan bertanggungjawaban keuangan daerah agar kualitas informasi

akuntansi yang dihasilkan andal dan akurat. Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal Untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan, implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah dan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, jika informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisiensian, dan ketidak efektifan (IHPS 1 tahun 2020).

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga laporan keuangan

Daerah dapat berkualitas. Namun kenyataannya tidak semua di pemerintahan memahami teknologi dan sistem akuntansi



keuangan daerah tersebut. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut (Ramadhan, 2015) yaitu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Salah satu hal yang juga mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung Teknologi Informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Menurut Jogiyanto (2007), informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan tepat waktu.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk



silkkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). (Akadun, 2009) mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga menjadi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (software), database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Celviana, Widianingrum, Rahmawati, 2010). Teknologi menggunakan seperangkat komputer untuk melakukan pengolahan data, sistem jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi yang digunakan agar data dapat dipublikasikan dan di akses secara global.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo diproses secara system, Pemerintah Kota Palopo telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi yang baik pada pengelolaan keuangan daerah serta sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai standar, dilihat dari jumlah komputer yang memadai sehingga sub bagian keuangan/akuntansi pemerintah Kota Palopo memiliki komputer dengan jumlah yang cukup



elaksanakan proses Akuntansi, begitupula dengan pemanfaatan internet telah dimanfaatkan diunit kerja pemerintah kota palopo

sebagai penghubung dalam pengiriman informasi laporan keuangan yang dibutuhkan. Dengan demikian Pengelolaan Keuangan daerah Kota Palopo telah menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Akadun (2009) mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Salah satu hal yang juga mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung Teknologi Informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang



Menurut (Jogiyanto, 2007) informasi merupakan produk dari sistem informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan

informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, handal dan tepat waktu.

Penelitian tentang pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan telah banyak dilakukan. Defitri (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Begitupula dengan Penelitian yang dilakukan oleh Slamet dan Irmadiani (2022) Hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik.



l penelitian Nurillah (2014) menyebutkan bahwa kompetensi SDM, an sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi

informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Irham (2022) Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa adalah kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan system teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan sistem teknologi informasi secara signifikan dapat memoderasi kompetensi sumberdaya manusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian sebelumnya variabel pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel dependen sedangkan pada penelitian ini menjadi variabel moderasi. Peneliti tertarik untuk menjadikan variabel moderasi adalah untuk melihat apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun alasan peneliti mengambil judul penelitian secara khusus di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palopo adalah karena pada instansi dimaksud terdapat perangkat yang mengkomplikasi



nggabungkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah a menghasilkan laporan keuangan pemerintah Kota Palopo. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses-proses Pengelolaan Keuangan dan Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Menggunakan Teknologi Informasi serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Pengelolaan keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan dengan Menggunakan Teknologi Informasi pada BPKAD Kota Palopo. Badan Pengelolan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Palopo mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penelitian ini akan dianalisis mengenai **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo.”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagaia berikut :

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo ?



2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo ?
3. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi ?
4. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo dengan Teknologi Informasi sebagai variabel Moderasi
4. Untuk Menganalisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo dengan Teknologi Informasi sebagai variabel Moderasi



#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai Pengaruh Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo
2. Manfaat praktis, dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menjadi masukan pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Palopo.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Teori keagenan (*agency theory*)

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut "*nexus of contract*". Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* merupakan perspektif yang secara jelas menggambarkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan, yaitu terdapatnya konflik kepentingan dalam perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa pemegang saham. Dalam realitasnya, pemegang saham ada yang mengendalikan usahanya sendiri, namun ada juga yang mempercayakannya kepada seorang manajer yang kemudian disebut sebagai agen. Akibatnya tanggung jawab pengelolaan perusahaan didelegasikan kepada manajer yang dapat menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan kegiatan prinsipal. Manajer dalam menjalankan tugasnya memiliki tujuan pribadi yang bertentangan dengan prinsipal dalam hal memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.



Mengurangi keuntungan dan pembayaran dividen dilakukan oleh manajer dengan cara membebankan biaya kepada perusahaan.

Konflik yang disebabkan karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan tersebut yang disebut dengan konflik keagenan. Di dalam teori agensi disebutkan adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham disebabkan karena manajer lebih mengetahui kondisi internal di sebuah perusahaan dibandingkan pemegang saham. Manajer memiliki motivasi lebih untuk memenuhi kepentingannya sendiri begitu juga dengan para pemegang saham yang memiliki kepentingan untuk meningkatkan kemakmurannya. Hal ini menyebabkan adanya *conflict of interest*, akibat dari kejadian tersebut maka muncul *agency cost*. Salah satu cara untuk menekan atau mengurangi *agency cost* adalah dengan keberadaan struktur organisasi yang jelas, sehingga dapat menciptakan sistem yang efisien untuk mengatur hubungan kerja sama antara agent dan principal.

Teori keagenan di pemerintah daerah mulai dipraktekan terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 1999. Penerapan teori keagenan ini dapat dijeaskan dari dua prospektif yaitu hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dan legislatif dengan rakyat. Dampak dari hubungan tersebut dapat berupa hal positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu alam betuk efisiensi, sedangkan ampak negatifnya beupa prilaku



ristis Bandariy (2012). Hal ini tersebut terjadi karena pihak agen keunggulan berupa informasi keuangan dari pada pihak prinsipal,

sedangkan dari pihak boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi karena memiliki keunggulan kekuasaan. Masalah keagenan muncul etk eksekutif cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan sampai dengan mnyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memrhatakan bahwa kinerja mereka selama ini baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporn keuangan yang engkap dan wajar, etapi juga pada bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para penggnaan laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan penggunaan laporan keuangan terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu pemeritah daerah akan berusaha untuk mewujudkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengeolaan keuangan daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan pnelitian ini dapat dilihat dari hubungan atau kontrak antara agen dan prinsipel dimana agen memiliki kunggulan kaena memiliki lebih banyak informasi ketimbang prinsipal karena agen merupakan pemangku kekuasaan. Salah satu informasi yng dimiliki oleh agen adalah berupa lapoan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak agen yang memiliki tanggungjawab untuk



kan laporan keuangan serta mempublikasikannya untuk  
 iahkan akses bagi masyarakat sebagai pihak prinsipal memiliki hak

untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawab dari pemerintah untuk masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintah) yang harus menetapkan strategis tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal. Pihak prinsipal tentu menginginkan hasil laporan keuangan yang baik dari agen dan kinerja tersebut salah satunya dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dan pelayanan yang baik.

### 2.1.2 Teori Kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*)

Teori Kegunaan Informasi (*Decision-Usefulness Theory*) Teori kegunaan- keputusan (*Decision-Usefulness Theory*) informasi akuntansi dikenal sejak tahun 1954 dan menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual *Financial Accounting Standar Boards* (FASB), yaitu *Statement Of Financial Accounting Concepts* (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahap awal, teori ini dikenal dengan nama lain yaitu *A Theory Of A Accounting To Investor* (Staubus, 2003 dalam Fikri et al., 2015: 6). Selain FASB, ada sebuah badan yang setara dengan FASB yaitu GASB. FAF membuat GASB pada tahun 1984 dalam hubungan “kakak-adik” dengan FASB. GASB bertanggungjawab untuk menetapkan standar akuntansi untuk aktivitas dan transaksi dari pemerintah pusat dan daerah,



an FASB menyusun standar akuntansi untuk semua organisasi termasuk non pemerintahan dan organisasi nonprofit (Freeman,

2008 dalam Untary, 2015: 22).

Kegunaan-keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan para penyaji informasi akuntansi agar dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan. Selanjutnya juga mengatakan bahwa sikap manajemen terhadap penerapan suatu standar akuntansi berhubungan dengan kepentingannya terhadap pengungkapan informasi akuntansi yang menggambarkan kinerja finansial dalam bentuk pelaporan keuangan. SFAC No. 2 tentang *Qualitative Characteristics of Accounting Information* menggambarkan hirarki dari kualitas informasi akuntansi dalam bentuk kualitas primer dan kualitas sekunder.

Kualitas primer dari informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi adalah nilai relevan (relevance) dan reliabilitas (reliability). FASB menyatakan bahwa nilai relevan dan reliabilitas adalah dua kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan. Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan bias, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Dikatakan relevan jika informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan.



ASB menyatakan bahwa agar menjadi relevan bagi investor, danyang lain dalam rangka investasi, kredit dan keputusan sejenis

maka informasi akuntansi harus memiliki kapabilitas untuk membuat suatu perbedaan pada suatu keputusan. Hal tersebut ditempuh dengan cara membantu pemakai dalam membentuk prediksi tentang hasil dari kejadian masa lalu, sekarang dan yang akandatang atau untuk mengkonfirmasi atau membenarkan harapannya.

Kandungan kualitas primer kegunaan-keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*). Teori telah menjelaskan bahwa untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik maka diperlukan pemanfaatan teknologi yang memadai. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat mencapai kandungan kualitas primer dari teori kegunaan informasi

### 2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No.17, 2003). Untuk dapat melaksanakan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang



terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangandaerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006).

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Suatu pengelolaan berkaitan erat dengan pengendalian internal, sistem pengendalian yang lemah akan mempengaruhi pendapat audit dalam laporan keuangan (Nugraheni & Subaweh, 2008). Salah satu bagian didalam pengendalian intern adalah informasi dan komunikasi



emantauan, didalam instansi tentu memerlukan informasi asi apalagi pemantauan agar menjalankan pengelolaan

organisasi terutama keuangan akan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. (Herawati, 2014) menjelaskan bahwa informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian maka komunikasi dan pemantauan merupakan proses dari pencapaian suatu pengelolaan yang baik.

Menurut Chabib sholeh dan Rochmansjah (2010) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

#### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

#### 2. Value for money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi

usat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan



memperhatikan konsep value for money, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

### 3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

### 4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi temuan mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak



batkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengingkari hak daerah kekurangan penerimaan, tidak menghambat

program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

#### 5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

#### 2.1.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standards Board* (IASB) yang sekarang disebut dengan *International Financial Reporting Standar* (IFRS) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang

as dan baik (Nugraheni & Subaweh, 2008)

l karena itu anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun



daerah haruslah dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah merupakan pelayan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peran penting dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat merupakan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah. Dengan demikian pemerintah ataupun pemerintah daerah harus dapat merencanakan dan menyelenggarakan program-program kerja yang tujuan akhirnya adalah menciptakan kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan.

Selain itu hal yang mendasar dan dianggap penting dalam penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi (Roviyantie, 2011). Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 13, 2006). Tujuan sistem akuntansi



adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan dasar hukum yang dimulai dari UU

No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Latifah & Sabeni, 2007). Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat.

### **2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (PP No. 71, 2010) dan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat



hi tujuannya. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan yaitu  
kan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo

anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kualitas atau mutu dapat dinilai dengan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sehingga karakteristik kualitatif harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dinilai sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Adapun karakteristik kualitatif dari suatu laporan keuangan adalah sebagai berikut (UU No. 17, 2003):

#### 1. Relevan

Relevan dalam laporan keuangan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dari mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan berikut ini:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.



d. Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

## 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur, Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (verifiability), Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas, Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.



### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud dalam laporan keuangan.



Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai

informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembuatan laporan keuangan.

#### 2.1.6 Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi sektor swasta tetapi juga dalam organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan tahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan



keputusan (Nurillah, 2014). (Akadun, 2009) mendefinisikan teknologi informasi sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga menjadi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (software), database, jaringan, electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Rahmawati, 2010). Teknologi menggunakan seperangkat komputer untuk melakukan pengolahan data, sistem jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi yang digunakan agar data dapat dipublikasikan dan di akses secara global.

Salah satu pendorong dan termasuk reformasi pemerintahan untuk mewujudkan good governance (khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah) adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan (Akadun, 2009). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipatgandakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010), bahkan komputer juga dapat



akan pekerjaan yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh manusia. Pengolahan data menjadi sebuah informasi dengan

menggunakan bantuan komputer akan lebih meningkatkan nilai dari sebuah informasi yang dihasilkan.

Peningkatan nilai informasi misalnya, informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disediakan dalam waktu yang cepat dan tepat. Pemrosesan data dapat dilaksanakan secara manual yang akan menghasilkan suatu informasi dengan waktu yang lebih lama daripada pemrosesan data dengan menggunakan komputer sehingga biaya yang dikeluarkan akan relatif lebih banyak. Sedangkan dengan bantuan komputer, pengolahan data dapat diatur sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan tepat waktu dan dengan biaya yang masih dibawah manfaat yang dihasilkan.

Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mewajibkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pemerintah Pusat dan Daerah berkewajiban untuk mengembangkan



manfaat kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi

keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi canggih untuk sistem informasi manajemen jaringan bangunan dan proses kerja yang memungkinkan government untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit (Nuryanto dan Nunuy, 2013).

Menurut Hamzah (2009) Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem.

Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya.



## **2.2 Hubungan Antara Variabel**

### **2.2.1 Hubungan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo**

Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah” Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat (Defitri, 2018) dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik maka akan menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang Berkualitas.



## **2.2.2 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo**

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Ratifah & Ridwan, 2012). Dengan demikian jika sistem keuangan daerah diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik (Roviyantie, 2011). Sistem akuntansi keuangan daerah erat kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada periode tertentu untuk mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan jadi lebih baik dan berkualitas.

## **2.2.3 Hubungan Pengelolaan Keuangan dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo**

Pesatnya kemajuan teknologi ini menjadikan teknologi sebagai bagian

tu pendukung berbagai aktivitas bagi para akademisi, pebisnis, al maupun pada kalangan birokrasi. Diharapkan dengan



menggunakan suatu teknologi ataupun pengaplikasian suatu sistem informasi, baik individu maupun organisasi dapat menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan sistem informasi pada instansi pemerintahan pada khususnya juga mempunyai peran yang cukup penting untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi terciptanya akuntabilitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam lampiran II dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sejalan dengan harapan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah berusaha mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan cara membangun teknologi informasi di bidang keuangan atau akuntansi dalam kaitannya pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Diharapkan dengan efektifnya



an SIPKD maka kualitas laporan keuangan mampu mewujudkan ansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

## 2.2.4 Hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Palopo

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah merupakan rangkaian yang dimulai dari prosedur, penyelenggara, peralatan serta elemen lainnya untuk mewujudkan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan entitas. Teknologi informasi adalah segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Untuk membuat keputusan yang lebih efektif dan informatif (Susilo, 2016). Mengingat perwujudan transparansi tidak terlepas dari kemampuan pemerintah pusat maupun daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana yang menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya serta menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas atau mutu dapat dinilai dengan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sehingga karakteristik kualitatif harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dinilai sebagai laporan keuangan yang berkualitas.



### Kelebihan Empiris

Kelebihan atau acuan yang berupa temuan-temuan melalui hasil sebagai acuan sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat

dijadikan sebagai sebuah data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti yang perlu dijadikan sebagai bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang ada pada penelitian ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti dalam penelitian ini:

Defitri (2018) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.

Nurilah dan Muid (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SKAD), Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.(Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Hasil Penelitian Menyatakan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai

h positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah



Sitepu dan Chartady (2020) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kualitas Laporan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening Pada Provinsi Kepulauan Riau. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak melalui Kualitas Laporan Keuangan. Atau dengan kata lain Kualitas Laporan Keuangan bukan variabel intervening antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah atau bersifat pengaruh langsung.

Slamet dan Irmadiani (2022) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Bpkad Kabupaten Bogor). Hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sudiaranti dan Ni Made (2015) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan



kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap penerapan SPIP, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; penerapan SPIP

dan SAP berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; serta kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan SPIP dan SAP.

Solikah, Astuti dan Sunarko (2016) Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh signifikan, pemahaman sistem akuntansi keuangan dan keuangan manajemen secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan di daerah pemerintah Boyolali sebagai variabel dependen.

Cahyandari (2017) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Sukoharjo) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sementara penerapan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



ois (2023) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem  
si Akuntansi, Dan Faktor Politik Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Bandar Lampung). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis software SPSS (*Statistical Product and Service Solution*). Jenis data penelitian mempergunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Kemudian untuk teknik perolehan sampel memakai saturation sampling dengan total 42 responden. Hasil pengujian hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak terbukti, sedangkan hasil pengujian hipotesis kelima dan keenam dinyatakan diterima.

Fauzie (2023) Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan dan positif. Secara simultan sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Rahayu dan Kanita (2022) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem



si keuangan pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi tem pengendalian intern pada OPD Provinsi DKI Jakarta

berpengaruh positif. Secara simultan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, sistem pengendalian intern menunjukkan pengaruh positif parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

